

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Y., & Puranta, B. H. (2010). Anggaran berbasis kinerja: penyusunan APBD secara komprehensif. UPP STIM YKPN.
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (BPPK). (2008). Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Djayasinga, Marselina. 2015. *Membedah APBD*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Gustina. 2021. "Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN. .
- Herlina. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Imam Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- J.R. Patiruhu, Stenley J. Ferdinandus, Welmin Marlo Komul. 2018. "Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris Pada Badan Pencarian Dan Pertolongan). *Jurnal SOSOQ*. Vol 6, No 1.
- Kukuh Prastianingrum, Ernadhi Sudarmanto, Agung Fajar Ilmiyono, Mela

- Nurdialy. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah Kota Bogor Periode 2014-2017. *JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM) BIDANG AKUNTANSI*. Vol 6, N0 1.
- LAN, UND 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Pemerintah RI. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pemerintah RI. (2015). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah RI. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*.
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah RI. (2020). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Rakhmi, Anggi Aisyah. 2018. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Sarjana thesis*. Universitas Brawijaya.

Refi, Illayuniga. 2019. PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada OPD Kota Surabaya). *Undergraduate thesis*. STIESIA SURABAYA.

Rezeqiah, Ana Muchlisa. 2017. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatra Selatan). *Skripsi thesis*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selviani, Dewi. 2020. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *LAND JOURNAL*. VOL 1 NO 2, HAL 108–219.

Septiyan, Resky. 2021. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor)*. *Skripsi*. Universitas Pakuan Bogor.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

<https://www.jambikota.go.id/>.